



# APBD DKI Catatkan Sejarah

## Ketua DPRD: Pergub Itu Keinginan Ahok

**TIDAK** tercapainya kesepakatan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan DPRD setempat terkait evaluasi Rancangan APBD 2015 membuat Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama akhirnya mengeluarkan peraturan gubernur (Pergub) APBD 2014. Dengan begitu, otomatis pembangunan Ibu Kota tahun ini kembali menggunakan pagu anggaran APBD 2014 sebesar Rp 72,9 triliun ■

Padahal RAPBD 2015 anggaran yang ditetapkan Rp 73,8 triliun. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, mengatakan penggunaan pergub keinginan Gubernur DKI yang biasa disapa Ahok. Hal itu dikarenakan gubernur ingin mengelola sendiri APBD sesuai keinginannya. "Harus diketahui seluruh masyarakat, keinginan penggunaan pergub bukan dari dewan, melainkan gubernur," ujar Pras, saat jumpa pers di kantornya, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (23/3).

Politisi PDI Perjuangan ini juga sudah tidak tahan difitnah oleh Ahok sebagai koruptor dan suka memainkan anggaran. Sehingga dia dan para anggota dewan lainnya sepakat menyerahkan sepenuhnya RAPBD 2015 kepada Ahok melalui penggunaan pergub. "Dengan begitu Pak Ahok tidak bisa memfitnah kami lagi sebagai pihak yang memainkan anggaran, karena sepenuhnya anggaran dikelola oleh pihak eksekutif," tegasnya.

Dia juga mengungkapkan, mengapa akhirnya pihak legislatif menyetujui penggunaan pergub terkait penggunaan APBD 2014. Itu tertuang dalam 9 poin kronologi hari per hari hingga jam per jam pembahasan evaluasi 114 halaman RAPBD 2015 yang dikoreksi Kemendagri karena terdapat 14 kriteria anggaran yang dilarang (*selengkapnya lihat grafis*).

"Saya sebagai Ketua DPRD memutuskan kita memakai pergub. Artinya, APBD 2014. Ini

merupakan keputusan rapat pimpinan. Rapat pimpinan telah dilakukan pukul 10.00 dan memutuskan RAPBD Jakarta 2015 dikembalikan kepada Gubernur DKI untuk menggunakan pergub," ujar pejabat yang akrab disapa Pras tersebut.

Selain membacakan putusan rapat pimpinan yang telah berlangsung, Pras juga menyampaikan permohonan maafnya karena telah mengatakan akan mendukung pengesahan RAPBD 2015 dengan peraturan daerah saat berkunjung ke Balai Kota, Kamis (19/3) lalu. Menurutnya, pernyataannya itu disampaikan tanpa proses pembicaraan terlebih dahulu dengan pimpinan DPRD lainnya, baik para wakil ketua, para ketua komisi, maupun para ketua fraksi.

"Saya juga minta maaf pernah mengucapkan *statement*, saat bertemu Pak Gubernur, kalau saya akan memperjuangkan perda. Tetapi kenyataan yang terjadi setelah saya menerima laporan pimpinan fraksi dan komisi, saya memutuskan dan membacakan apa yang dikerjakan dan diputuskan oleh teman-teman," cetusnya juga. Dengan penggunaan pergub itu, Jakarta mencatat sejarah karena baru kali pertama penggunaan Pergub APBD di Tanah Air.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menjamin pelayanan masyarakat tidak akan terganggu meskipun menggunakan pagu APBD 2014. "Walaupun pakai pergub yang artinya pakai anggaran tahun lalu, ya tidak apa-apa, harus kita jalani. Yang penting, jangan sampai mengganggu pelayanan masyarakat," terangnya.

Selain itu, menurut dia juga, apabila tahun ini RAPBD 2015 ini tidak menggunakan perda maka dampaknya tidak akan terlalu signifikan terhadap pembangunan infrastruktur di Ibu Kota. Salah satunya transportasi masal publik yakni Mass Rapid Transit (MRT).

"Pembangunan MRT tidak

akan terganggu. Lagi pula, MRT itu kan juga program dengan pemerintah pusat. Jadi, tidak ada masalah. Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sebesar Rp1 triliun juga masih bisa," ujarnya. Lebih lanjut, Ahok menuturkan apabila menggunakan pergub, maka DPRD tidak lagi memiliki kewenangan mengawasi penggunaan anggaran.

Di sisi lain, pengawasan anggaran akan dilakukan secara langsung oleh Kemendagri. "Penggunaan anggaran pun akan lebih diprioritaskan untuk menyelesaikan masalah kemacetan, banjir, pengadaan barang dan jasa serta peningkatan kualitas pendidikan," tutur Ahok juga.

Meskipun demikian, dia mengungkapkan terdapat satu kerugian apabila menggunakan Pergub APBD bukan perda.

Yakni jika pemasukan DKI mengalami peningkatan pada tahun ini, maka akan tetap menjadi pemasukan, dan belum dapat dibelanjakan. "Jadi, ya disimpan saja dulu," ungkap Basuki.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Yenny Sucipto mengatakan, ada keuntungan dan kerugian dengan digunakannya pergub untuk APBD DKI. Keuntungan memakai Pergub memberikan keleluasaan kepada Pemprov DKI menyusun anggaran, dengan menggunakan pagu anggaran APBD 2014.

Sayangnya, pagu anggaran 2014 yang digunakan bukan Rp 72,09 triliun, melainkan Rp 63 triliun. "Berdasarkan informasi dari Kemdagri, pagu anggaran yang dipakai yang terealisasi 2014. Anggaran yang terealisasi tahun lalu hanya Rp 63 triliun. Jadi ada penurunan alokasi anggaran Rp 10 triliun dari tahun ini. Itu kerugian pertama," ujarnya.

Kedua, anggaran yang disusun harus dialokasikan kepada anggaran urusan wajib, seperti pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik, serta urusan belanja belanja rutinitas dan





pegawai. Di luar dua urusan itu, tidak bisa dianggarkan. "Jadi, jika program anggaran hanya untuk urusan wajib dan belanja mengikat, tidak bisa dialokasikan ke program pembangunan yang lain. Itu yang merugikan masyarakat," jelasnya.

Koordinator Advokasi dan Investigasi Seknas Fitra, Apung Widadi menambahkan, ada tiga keuntungan menggunakan Pergub APBD 2014. Pertama, meski menggunakan Pergub APBD DKI 2014, Pemprov DKI memiliki solusi terhadap anggaran yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga Jakarta.

Kedua, pagu anggaran yang digunakan adalah APBD Perubahan DKI 2014. Artinya, rencana belanja brokrasi dengan mengalokasikan gaji sangat tinggi otomatis gugur. (wok)

## Kronologis Deadlocknya Evaluasi RAPBD 2015 (Versi DPRD DKI)

Jumat (20/3)

<p><b>Pukul 10.00</b> <b>1</b></p> <p>DPRD menunggu rincian RAPBD 2015 hasil pembahasan terkait evaluasi Kemendagri. Namun, sampai saat yang ditunggu berkas tidak diberikan.</p>	<p><b>Pukul 16.00</b> <b>3</b></p> <p>DPRD berinisiatif mengundang TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Namun, TAPD hadir tanpa membawa rincian anggaran. Lalu TAPD berjanji menyerahkan secara lengkap pukul 19.00.</p>	<p><b>Pukul 20.35</b> <b>5</b></p> <p>Tim TAPD datang membawa dokumen tapi hanya belanja langsung RAPBD 2015. Rincian belanja tidak langsung dan pendapatan tidak diserahkan. Karena itu, DPRD menganggap pihak eksekutif tidak serius.</p>
<p><b>Pukul 14.30</b> <b>2</b></p> <p>DPRD masih menunggu hasil evaluasi. Namun, Pemprov DKI masih tidak datang menyerahkan dokumen tersebut.</p>	<p><b>Pukul 19.00</b> <b>4</b></p> <p>Dewan tidak jadi rapat dengan TAPD lantaran tim TAPD tidak datang membawa dokumen RAPBD 2015 secara rinci.</p>	<p><b>Pukul 21.30</b> <b>6</b></p> <p>DPRD menggelar rapat Badan Anggaran. Namun, rapat ditutup karena tidak ada dokumen untuk dibahas.</p>
<p><b>Pukul 22.00</b> <b>7</b></p> <p>DPRD menggelar rapat pimpinan untuk menampung aspirasi fraksi dan komisi-komisi dengan kesimpulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak bisa memutuskan karena dokumen RAPBD 2015 tidak lengkap.</li> <li>Seluruh fraksi, kecuali Fraksi Nasdem, merekomendasikan menolak RAPBD 2015 dan menyerahkan pembahasan kepada Gubernur DKI untuk ditetapkan menjadi pergub.</li> <li>Rapat menyampaikan kesimpulan kepada Ketua DPRD.</li> </ol>		
<p>Senin (23/3)</p>		
<p><b>Pukul 10.00</b> <b>8</b></p> <p>Rapat pimpinan yang digelar pukul 10.00 memutuskan RAPBD DKI Jakarta 2015 dikembalikan kepada Gubernur DKI untuk menggunakan pergub penggunaan APBD 2014.</p>		